

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN
JIKA TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



OLEH :
IQBAL MIFTAHUL ILMI
NBI : 1312000016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN
JIKA TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

IQBAL MIFTAHUL ILMI

NBI: 1312000016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN
JIKA TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh:

IQBAL MIFTAHUL ILMI

NBI: 1312000016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Jika Terlambat
Memusnahkan Narkotika**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna
mencapai gelar sarjana hukum**

Oleh:

Iqbal Miftahul Ilmi
NIM.1312000016

Dosen Pembimbing

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H

NPP/NIP: 20310200828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Jika Terlambat
Memusnahkan Narkotika
Oleh :**

IQBAL MIFTAHUL ILMU

NPM : 1312000016

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 19 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal : 19 Desember 2023

TIM PENGUJI

**Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310880149**

**Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NPP/NIP: 20310930349**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130612**



Mengetahui :



**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan**

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Miftahul Ilmi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000016

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Cermin: Jurnal Penelitian: **URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN YANG TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA**. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2023
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Iqbal Miftahul Ilmi
NPM : 1312000016

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Miftahul Ilmi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000016

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Cermin: Jurnal Penelitian: **URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN YANG TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA**. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember2023
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Iqbal Miftahul Ilmi
NPM : 1312000016

v

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Miftahul Ilmi
NIM : 1312000016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
**PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN
JIKA TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA**

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 20 Desember 2023
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Iqbal Miftahul Ilmi
NPM: 1312000016

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Miftahul Imani
NIM : 1212000016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya :

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclisive)* karya ilmiah saya yang berjudul

PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK

KEPOLISIAN JIKA TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 20 Desember 2023

Yang menyatakan



Iqbal Miftahul Imani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta memberikan kelancaran untuk mengerjakan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir kepada seluruh orang yang saya sebutkan dalam halaman kata pengantar. Penulis hanya bisa mengatakan “Tersenyumlah dalam situasi apapun, tanpa disadari senyum itu yang akan menguatkanmu”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalaamiin, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN JIKA TERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA ”.

Sesungguhnya menurut penulis, tidak memungkiri bahwa skripsi ini berperan sangat penting dalam menandai akhir dari sebuah perjalanan akademik penulis. Penulisan penelitian skripsi ini memiliki tujuan untuk melengkapi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Diharapkan skripsi ini berguna untuk memberikan kontribusi positif terhadap bidang ilmu hukum yang dipelajari. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan serta kelemahan yang mungkin ada di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT
2. Keluarga dan saudara - saudara, khususnya kepada mama saya Halinur dan ayah saya Budi Erwanto yang selalu mendoakan setiap apa yang sedang diusahakan oleh penulis, memberikan bantuan secara moriil maupun secara materiil kepada penulis dan juga selalu mendampingi penulis baik senang maupun duka.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M., CMA.,CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasihat dan saran – sarannya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada.

8. Teman baik penulis Alfonsus Ryan, Jordan Abhisa, Erga Firmansyah, Angga Eka Setiawan, Dendy Valerian yang selalu menemani penulis hingga saat ini dengan memberikan dukungan semangat, hiburan, menjadi tempat penulis mencurahkan keluh kesahnya, serta memberikan masukan dan saran yang sangat berdampak positif bagi penulis.
9. Seluruh teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Saya Iqbal Miftahul Ilmi, selaku penulis yang senantiasa telah mengusahakan berdiri tegar melewati segala rintangan dengan selalu berdoa kepada Allah SWT.

Diakhir kalimat penulis berdoa, semoga hal – hal baik selalu berpihak kepada siapapun aamiin.

Surabaya, 20 Desember 2023
Penulis



Iqbal Miftahul Ilmi
1312000016

x

ABSTRAK

Tindak pidana Narkotika sangat meresahkan bagi semua negara yang ada di dunia, maupun di Indonesia sendiri. Dikarenakan dari beredarnya narkotika yang sangat tidak terkontrol menjadikannya sebagai kejahatan yang luar biasa. Kepolisian menjadi salah satu institusi yang berhak dalam penangkapan tindak pidana Narkotika. Beberapa tahapan untuk telah dilakukan dimulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan. Pengaturan tentang sanksi pidana terhadap pihak kepolisian yang terlambat memusnahkan narkotika masih memuat norma yang samar. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari apabila berkaitan dengan suatu daerah yang sulit untuk dijangkau karena faktor geografis atau transportasi. Tetapi apabila telah melewati batas yang ditentukan, maka sanksi yang diterima tidak diketahui dan tidak ada kepastian hukum yang mengatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman apa yang seharusnya diberi kepada kepolisian apabila terlambat memusnahkan barang bukti narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, Jenis penelitian ini memfokuskan pada pengumpulan bahan-bahan hukum, dan mencari kebenarannya untuk mendapatkan solusi dari pemasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya memiliki tanggungjawab dalam tugas dan kewenangannya masih didapati penyalahgunaan dari tugasnya. Di Indonesia sendiri tidak membedakan hukum kepada siapapun, maka dari itu aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenangnya dapat dikenakan sanksi, dari pengadilan umum maupun dari kode etik profesi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Kepolisian, Penyidik

ABSTRACT

Narcotics crimes are very disturbing for all countries in the world, as well as in Indonesia itself. Due to the uncontrolled distribution of narcotics, it is an extraordinary crime. The police are one of the institutions that have the right to arrest narcotics crimes. Several stages have been carried out starting from arrest, detention, confiscation, inspection. Regulations regarding criminal sanctions against police who are late in destroying narcotics still contain vague norms. In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics it is stated that the handover of confiscated goods as referred to in paragraph (1) can be carried out within a maximum period of 14 (fourteen) days if it relates to an area that is difficult to reach due to geographical or transportation factors. However, if the specified limit has been exceeded, the sanctions received are unknown and there is no legal certainty that regulates them. The aim of this research is to find out what punishment should be given to the police if they are late in destroying narcotics evidence. The research method used is normative. This type of research focuses on collecting legal materials and searching for the truth to get solutions to problems. The results of this research show that law enforcement officers who should have responsibility in their duties and authority are still found to be abusing their duties. In Indonesia, the law does not differentiate between anyone, therefore law enforcement officers who abuse their duties and authority can be subject to sanctions, from the general court or from the professional code of ethics

Keywords: *Narcotics Crime, Police, Investigators*

DAFTAR ISI

PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN JIKATERLAMBAT MEMUSNAHKAN NARKOTIKA.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Peneltian	7
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5. Teknis Analisis Bahan Hukum	8
1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematis	8
BAB II Tinjauan Pustaka	9
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.2. Tindak Pidana.....	12
2.3. Teori Dalam Tindak Pidana.....	16
2.4. Pengertian Narkotika	17
2.5. Definisi Kepolisian.....	21
2.6. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan	21
2.7. Alat Bukti dan Prinsip Pembuktian	23
BAB III Pembahasan	25
3.1. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Penyidik Kepolisian Jika Terlambat Memusnahkan narkotika	25

3.1.1. Pengaturan Narkotika Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009.....	25
3.1.2. Tahapan Dalam Penyidikan dan Penyelidikan.....	30
3.1.3. Pemusnahan Narkotika	50
3.2. Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Jika Penyidik Terlambat Memusnahkan Narkotika	
3.2.1. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika.....	57
3.2.2. Kode Etik Kepolisian	66
BAB IV Penutup	
4.1. Simpulan	77
4.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79